



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH RAPAT KERJA KOMISI VI DPRRI DENGAN MENTERI
PERDAGANGAN RI**

- Tahun Sidang : 2020-2021
Masa Persidangan : V
Rapat Ke- :
Jenis Rapat : Rapat Kerja
Sifat Rapat : Terbuka
Hari, Tanggal : Senin, 31 Mei 2021
Waktu : 16.00 s.d 18.48 WIB
Tempat : Ruang Rapat Komisi VI DPRRI Gedung Nusantara I
Lt.1 Jl. Jenderal Gatot Soebroto, Jakarta 10270
- Ketua Rapat : Mohamad Hekal, M.B.A., Wakil Ketua Komisi VI DPRRI
- Acara : Pembahasan RKP K/L dan RKA K/L Tahun 2022
- Sekretaris Rapat : Dewi Resmini, S.E., M.Si., Kabag Sekretariat Komisi VI DPRRI
- Hadir : A. Anggota DPRRI:
45 dari 54 orang Anggota dengan rincian:
1. FRAKSI PDI-PERJUANGAN (F-PDIP)
11 dari 12 orang Anggota
 1. Adisatrya Surya Sulisto
 2. Muhammad Prakosa
 3. Darmadi Duriyanto (Matriks)
 4. Rieke Diah Pitaloka
 5. ST. Ananta Wahana, S.H.
 6. Sonny T. Danaparamita
 7. I Nyoman Parta, S.H.
 8. Deddy Yevri Hanteru Sitorus, M.A.
 9. Dr. Evita Nursanty, M.Sc.
 10. Sondang Tiar Debora Tampubolon
 11. dr. H. Mufti A. N. Anam
 2. FRAKSI PARTAI GOLKAR (F-PG)
8 dari 8 orang Anggota
 1. I Gde Sumarjaya Linggih, S.E., M.A.P
 2. Ir. H.M. Idris Laena, M.H.
 3. Drs. Mukhtarudin
 4. Lamhot Sinaga
 5. H. Singgih Januratmoko, S.K.H., M.M.
 6. Doni Akbar, S.E.

7. Trifena M. Tinal, B.SC.

8. Nusron Wahid

3. FRAKSI PARTAI GERINDRA (F-GERINDRA)
6 dari 7 orang Anggota
 1. Mohamad Hekal, M.B.A.
 2. Andre Rosiade
 3. Dr. Supratman Andi Agtas, S.H., M.H.
 4. Khilmi
 5. Ir. H. La Tinro La Tunrung
 6. M. Husein Fadlulloh, S.Bus., M.M. M.B.A.
4. FRAKSI PARTAI NASDEM (F-NASDEM)
4 dari 5 orang Anggota
 1. Nyat Kadir
 2. H. Subardi, S.H., M.H.
 3. Zuristyo Firmadata, S.E., M.M.
 4. Muhammad Rapsel Ali
5. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (F-PKB)
4 dari 6 orang Anggota
 1. Ir. H. M. Nasim Khan
 2. Tommy Kurniawan
 3. Marwan Ja'far
 4. Drs. H. Mohammad Toha, S.Sos., M.Si.
6. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT (F-PD)
3 dari 5 orang Anggota
 1. DR. Ir. E. Herman Khaeron, M.Si.
 2. Muhammad Dhevy Bijak
 3. Hj. Melani Leimena Suharli
7. FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (F-PKS)
3 dari 4 orang Anggota
 1. Amin, AK., M.M.
 2. Hj. Nevi Zuairina
 3. Mahfudz Abdurrahman, S.Sos.
8. FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL (F-PAN)
5 dari 5 orang Anggota
 1. Abdul Hakim Bafagih
 2. Nasril Bahar, S.E.
 3. Primus Yustisio, S.E.
 4. Daeng Muhammad, S.E., M.Si.

5. Eko Hendro Purnomo, S.Sos.

9. FRAKSI PARTAI PERSATUAN
PEMBANGUNAN (F-PPP)

1 dari 2 orang Anggota

1. Elly Rachmat Yasin

B. UNDANGAN

1. Menteri Perdagangan RI dan jajarannya

2. Undangan lainnya

JALANNYA RAPAT:

KETUA RAPAT (MOHAMAD HEKAL, M.B.A.):

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* yang selalu menambah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat melaksanakan Rapat Kerja Komisi VI dengan Menteri Perdagangan RI pada hari ini dalam keadaan sehat *wal afiat* dan terhindar dari wabah Covid.

Sehubungan dengan kondisi yang tidak kondusif terkait dengan penyebaran virus Covid, rapat-rapat yang dilakukan alat kelengkapan dewan dan mitra pemerintah dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

Satu, berdasarkan Pasal 226 Ayat 3 Peraturan DPRRI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib berbunyi, "Semua jenis rapat DPR dilakukan di gedung DPR kecuali ditentukan lain; rapat dapat dilakukan di luar gedung DPR atas persetujuan Pimpinan DPR maka dapat dilakukan secara tatap muka atau pun secara virtual."

Peliputan pelaksanaan Rapat Komisi VI dilakukan oleh *live streaming* TV Parlemen dan media cetak lain dan elektronik lainnya dapat mendapatkan sumber dari di TV Parlemen.

Berdasarkan Pasal 249 Ayat 1 Peraturan DPR RI Nomor 1 2014 tentang Tata Tertib menyebutkan bahwa untuk kepentingan administrasi semua anggota menda menandatangani daftar hadir sebelum menghadiri rapat dan dikarenakan kondisi yang tidak kondusif, anggota yang hadir secara elektronik dapat mencatat, akan tercatat partisipasinya dalam aplikasi Zoom.

Rapat dihadiri paling banyak 20% dari jumlah Anggota Komisi sebagai peserta mitra kerja dengan komposisi sebagai berikut: Pendamping mitra kerja berjumlah 5 orang yang ditempatkan di balkon ruang rapat komisi, pendamping dan dari mitra yang tidak berhubungan langsung dan tidak tertampung di balkon dapat meninggalkan gedung DPR. Pendampingan dari mitra kerja yang tidak tertampung, boleh mengikuti rapat secara virtual, dan

pendamping dari anggota komisi, tenaga ahli dan staf untuk tidak mendampingi anggotanya di komisi.

Selanjutnya, berdasarkan surat dari Ketua DPR Nomor PW1073 DPRRI 92020 tanggal 11 September 2020 tentang pembatasan kehadiran fisik pada rapat-rapat, kami meminta tata cara dilakukan sebagai berikut:

1. Kegiatan rapat dilakukan dengan protokol kesehatan yang ketat.
2. Lamanya rapat tidak boleh lebih dari dua setengah jam.
3. Alur rapat adalah pembukaan, presentasi singkat oleh kementerian lembaga, pernyataan anggota, tanggapan kementerian, tanggapan balik anggota, tanggapan akhir dan kesimpulan serta penutup. Presentasi diberikan waktu 5 menit dan tanggapan pertama 10 menit, dan tanggapan akhir 10 menit, anggota diberikan waktu untuk bertanya dan tanggapan balik selama 3 menit masing-masing. Lalu lintas rapat diatur oleh admin yang membantu pimpinan rapat terutama dalam menghidupkan dan mematikan mikrofon.

Bapak Ibu dan hadirin yang kami muliakan,

Menurut laporan dari Sekretariat Komisi VI DPRRI yang hadir dan menandatangani daftar absen adalah 26 orang dengan 3 anggota izin dari 9 fraksi, sehingga kuorum telah terpenuhi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 281 Ayat 1 DPRRI Tahun 2020 tentang Tata Tertib, maka perkenankan kami untuk membuka rapat kerja pada hari ini dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum. Setuju ya.

(RAPAT DIBUKA PUKUL 17.22 WIB)

Terima kasih, kami ucapkan kepada Menteri Perdagangan atas kesediaan waktunya untuk menghadiri rapat kerja pada hari ini dalam rangka pembahasan RKP K/L dan RKA K/L Tahun 2022 Kementerian Perdagangan.

Bapak Ibu dan hadirin yang kami muliakan.

Sebagaimana kita ketahui, tata cara pelaksanaan tugas komisi di bidang anggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 59 Ayat 2 Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib antara lain mengadakan pembicaraan pendahuluan rancangan APBN yang meliputi rencana kerja pemerintah, serta rencana kerja dan anggaran kementerian dan lembaga RKA K/L dalam ruangan lingkup tugas komisi dan usulan anggota mengenai program pembangunan daerah pemilihan bersama dengan pemerintah untuk disampaikan kepada Badan Anggaran DPRRI.

Perlu kami sampaikan bahwa Rapat Kerja Komisi VI pada hari ini adalah sesuai dengan Surat Pimpinan Badan Anggaran dengan Nomor AG03981 DPRRI 3 2021 tanggal 23 Maret 2021 mengenai penyampaian rencana rancangan jadwal pembahasan pembicaraan pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran 2022 dan RKP Tahun 2022, yang menjadwalkan Rapat

Kerja Komisi dengan mitra kerjanya antara tanggal 2 sampai dengan 10 Juni 2021. Untuk itu, kami pertama meminta persetujuan untuk agenda rapat kita hari ini untuk kita selesaikan jam berapa, Pak Menteri? Jam 6 ya. Baik, jadi kita sementara jadwalkan jam 6, setuju ya.

(RAPAT: SETUJU)

Baik, apabila selanjutnya. Selanjutnya, kami persilakan Bapak Menteri untuk menyampaikan materi sesuai dengan undangan rapat pada hari ini.

MENTERI PERDAGANGAN:

Terima kasih, Pimpinan.

***Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.***

**Selamat sore,
Salam sejahtera bagi kita semua,
Bapak Ketua dan Wakil Ketua Komisi VI DPRRI yang terhormat,
Bapak Ibu Anggota Komisi VI yang terhormat,**

Puji serta syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, di mana pada hari ini kita dapat bertemu dalam keadaan sehat *wal afiat*. Suatu kehormatan bagi kami dapat bertatap muka dengan yang terhormat seluruh Pimpinan dan Anggota Komisi VI DPRRI.

Perkenankan kami menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya atas undangan dari Komisi VI DPRRI untuk melakukan rapat kerja pada hari ini dengan agenda pembahasan RKP K/L dan RKA K/L tahun 2022. Pelaksanaan untuk, sebelum kami menyampaikan rencana kerja dan anggaran Kementerian Perdagangan tahun 2022, perkenankan kami terlebih dahulu menyampaikan pelaksanaan program dan anggaran tahun 2021. Realisasi Kementerian Perdagangan per tanggal 28 Mei 2021, sebesar Rp 618.698.776.225 atau setara dengan 21,06% dari total pagu Rp 2.937.385.806.000.

Selanjutnya, dapat kami sampaikan bahwa hingga saat ini masih terdapat beberapa kegiatan di Kementerian Perdagangan yang anggarannya masih diblokir oleh Kementerian Keuangan dengan total anggaran 307,49 miliar, karena data dukung dan kelengkapan administrasi yang diperlukan untuk pembukaan tanda blokir belum lengkap.

Adapun beberapa kegiatan yang diblokir antara lain:

1. Pembangunan atau revitalisasi pasar rakyat sejumlah 164,45 miliar.
2. Pembangunan pusat produk dalam negeri unggulan daerah di Makassar, sebesar 30 miliar.
3. Pembangunan pusat jajanan kuliner di 10 kawasan wisata, sebesar Rp 44 miliar.

4. Pembangunan atau revitalisasi gedung non-SRG, sebesar Rp 16,5 miliar, serta
5. Kegiatan lainnya, pengadaan kendaraan operasional, pengadaan peralatan perkantoran, pembangunan lanjut Gedung Standarisasi dan Pengendalian Mutu dan lain-lain sebesar 52,54 miliar.

Kementerian Perdagangan terus melakukan koordinasi dengan Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan, agar kegiatan-kegiatan tersebut dapat segera diblokir, dibuka blokirnya.

**Bapak dan Bapak dan Ibu,
Pimpinan, Anggota Komisi VI yang terhormat,**

Sesuai dengan tema RKP tahun 2022, yaitu pemulihan ekonomi dan reformasi struktural, Kementerian Perdagangan mendukung beberapa prioritas nasional, antara lain:

- Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan.
- Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing, serta
- Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan.

Sebagai penjabaran dari ketiga prioritas nasional tersebut, Kementerian Perdagangan telah menetapkan 6 sasaran strategis dengan indikator dan target tahun 2022, sebagaimana terlihat di dalam tabel.

Yang pertama, sasaran strategis adalah mewujudkan stabilisasi harga dan ketersediaan bahan-bahan pangan yang indikatornya inflasi pangan tidak bergejolak dengan target antara 3, dengan target 3,1 *plus* atau 1 minus 1%.

Yang kedua adalah mewujudkan konsumen cerdas dan pelaku usaha tertib, serta bertanggungjawab. Indikatornya adalah dengan indeks perlindungan konsumen dan tata tertib niaga, indeks target adalah 50. Meningkatkan pasar produk dalam negeri dan indikatornya adalah pertumbuhan subsektor perdagangan besar dan eceran bukan mobil, dan sepeda motor terhadap PDB dengan target yaitu, 5,3% dari PDB.

Yang keenam adalah sasaran strategisnya, meminimalkan peranan perdagangan berjangka komoditi, sistem resi gudang dan pasar lelang komoditas. Indikatornya adalah pertambahan nilai transaksi perdagangan berjangka komoditi dengan target tahun 2022 adalah 10%, pertambahan nilai resi gudang yang diterbitkan dengan target tahun 2022 adalah 9% dan pertumbuhan realisasi transaksi pasar lelang komoditas dengan target tahun 2022 adalah 5%.

Yang kelima adalah meningkatkan, meningkatnya pertumbuhan ekspor barang nonmigas yang bernilai tambah dan jasa. Dari indikator yaitu, neraca perdagangan, antara 10,61 miliar – 11,86 miliar, dengan target yaitu yang sama, yaitu 10,6-11,86 miliar. Ekspor nonmigas dengan target pertumbuhan

pada tahun 2022 sebesar 7,1%-7,64% dan perundingan FT PTA/FTA/CEPA disepakati setidaknya pada tahun 2022 dengan target 30 kesepakatan.

Yang keenam, meningkatkan kinerja Kementerian Perdagangan yang bersih, *akuntable* dan *professional*. Dengan indikator, indeks reformasi birokrasi dengan indeks setidaknya pada tahun 2022 adalah 80, untuk unit kerja pelayanan pebulik yang mendapatkan predikat wilayah bebas dari korupsi atau wilayah birokrasi bersih dan melayani setidaknya pada tahun 2022 adalah 2 unit kerja, serta nilai evaluasi AKIP dengan predikat BB, opini BPK terhadap laporan keuangan menjadi wajar, dengan WTP dan tingkat kematangan sistem pemerintahan berbasis elektronik dengan predikat baik.

Dalam upaya mendukung upaya prioritas nasional tersebut di atas, Kemendag sementara menyusun program atau kegiatan yang mendukung prioritas nasional tahun 2022, antara lain:

1. Pembangunan revitalisasi pasar rakyat tipe C dan D dan gudang non-SRG, dengan total anggaran sebesar Rp455 miliar dengan mendukung PN I.
2. Pembangunan pusat jajanan kuliner, dengan total anggaran Rp17,5 miliar dengan mendukung PN I.
3. Melakukan pengawasan kegiatan perdagangan dan edukasi konsumen, dengan total anggaran Rp78,9 miliar dengan mendukung PN 1 dan PN 4.
4. Mengimplementasikan dan memanfaatkan SRG, dengan total anggaran sebesar Rp6,7 miliar dengan mendukung PN 1.
5. Promosi dan *branding* produk Indonesia, mendukung BBI, pemindaan pelaku usaha serta pemantauan stabilisasi bapokting, dengan total anggaran sebesar Rp168,6 miliar dengan mendukung PN 1.
6. Melaksanakan EXPO DUBAI 2020, dengan total anggaran sebesar Rp92 miliar, itu untuk mendukung PN1.
7. Melakukan misi dagang, pameran dan promosi, peningkatan ekspor luar negeri dengan total anggaran Rp75,5 miliar.
8. Melakukan perundingan dan ratifikasi perjanjian perdagangan internasional, dengan total anggaran Rp55,4 miliar dan mendukung PN 1.
9. Memfasilitasi pelayanan perizinan dan fasilitas ekspor-impor dengan total anggaran sebesar Rp50,8 miliar untuk mendukung PN 1.
10. Pengembangan SDM yang meliputi vokasi kemetrolagian, pelatihan ekspor dan SDM perdagangan dengan total anggaran sebesar Rp56,9 miliar untuk mendukung PN 1 dan 3.

Bapak Ibu Pimpinan Komisi VI yang terhormat.

Berdasarkan Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Kepala Bappenas Nomor S-361/MK.02/2021 dan Nomor B-238/MPN/D.8/PP.04/02/04/2021, perihal Pagu Indikatif Belanja K/L Tahun Anggaran 2022, Kementerian Perdagangan mendapatkan pagu indikatif sebesar Rp2.392.277.527.000. Pagu indikatif

tersebut turun sebesar Rp514.547.765.000 atau 17,7% dari pagu alokasi anggaran tahun 2021, setelah penghematan. Adapun secara rinci Pagu indikatif Kementerian Perdagangan Tahun 2022 telah disesuaikan dan dibahas bersama Menteri Keuangan dan Bappenas pada periode *term meeting* yang dapat dilihat dari tabel berikut.

Bapak dan Ibu, saya tidak akan membacakan satu-satu, tetapi dari totalnya yaitu Rp2.906.825.292 pada tahun 2021, Pagu indikatifnya adalah Rp2.393.277.527 atau selisihnya perbedaan 17,7%

Bapak, Ibu dan Anggota Komisi VI yang terhormat,

Selain itu, dapat kami sampaikan bahwa Kementerian Perdagangan juga telah mengusulkan kepada Menteri Keuangan dan Menteri PPN, Kepala Bappenas terkait pembiayaan kegiatan yang didanai melalui dan dana alokasi khusus (DAK) pada Tahun 2022, sebagaimana tertuang dalam surat kami Nomor 142MDAG SD2 2021 tanggal 15 Februari 2021, hal usulan kegiatan di bidang perdagangan tahun 2022.

Namun demikian, dalam tindak lanjutnya sesuai dengan arahan kebijakan nasional yang disampaikan oleh Bappenas dalam berbagai forum *multilateral meeting* DAK, bahwa kebijakan DAK selain mutu pelayanan dasar pada tahun 2022 DAK, penugasan akan dilaksanakan secara tematik dan terintegrasi. Untuk itu, Kementerian Perdagangan diarahkan untuk mendukung 2 tematik penugasan, yaitu: Tematik pertama adalah penguatan destinasi pariwisata prioritas dengan kegiatan pembangunan atau revitalisasi pasar rakyat tematik, wisata sebanyak 10 unit pada 10 daerah pariwisata prioritas dan satu unit di Bali. Tematik kedua adalah pengembangan kawasan *food estate* dan sentra produksi dalam kegiatan pembangunan gudang korporasi, korporasi petani pada dua daerah kawasan *food estate* di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Humbang Hasundutan dan Provinsi Kalimantan Tengah, Kabupaten Pulang Pisau.

Selanjutnya, kami sampaikan bahwa perkembangan kegiatan DAK tahun 2022 saat ini tengah memasuki proses sosialisasi kebijakan kepada pemerintah daerah yang diselenggarakan oleh Bappenas. Memperhatikan keterbatasan pagu indikatif Kementerian Perdagangan Tahun 2022 sebesar Rp2.392.277.527, tentunya kami akan berupaya untuk mengalokasikan secara optimal pada program kegiatan, mewujudkan target kinerja diterapkan dalam rencana kerja pemerintah tahun 2022. Namun demikian, apabila keuangan negara memungkinkan Kementerian Perdagangan mengajukan usulan tambahan anggaran sebesar Rp288.738.240.000 untuk membiayai beberapa program kegiatan yang penting, untuk dapat mempertahankan dan meningkatkan kinerja tahun 2022 sebagai berikut:

1. Pemenuhan belanja operasional KDEI selama ini dibiayai PNBPN, sementara PNBPN KDEI sejak tahun 2020 tidak mencapai target akibat pandemi Covid 19 sebesar Rp8.070.780.000 yang selama ini didanai oleh PNBPN.
2. Kegiatan pengembangan ekonomi digital tahun 2022 sebesar 10 miliar rupiah.

3. Pengawasan kegiatan Kemendag, pengawalan perbaikan tata kelola di lingkungan Kemendag dan pengawasan urusan pemerintah daerah bidang perdagangan sebesar Rp19.424.230.000.
4. Pelaksanaan Presidensi G20, persiapan ketuanrumahan ASEAN 2023, ketuanrumahan dalam ICCO atau dan ATRC, pelaksanaan FTA *center* di pusat dan beberapa perundingan lain yang belum teranggarkan sebesar Rp69.369.860.000.
5. Kelengkapan sarana dan prasarana perkantoran dan perkuliahan di antaranya pengembangan mebeliar Gedung kelas B dan C, pengadaan alat laboratorium dan pembangunan lanjutan gedung kampus Akademi Metrology (Akmed) sebesar Rp90.572.370.000.
6. Penyelenggaraan jalur *inpassing* dan peralatan laboratorium pengujian mutu sebesar Rp1.500.000.000.
7. Pengembangan ruang lingkup pelayanan kalibrasi, pembangunan ruang lingkup layanan pengujian mutu barang, inflasi pengujian UTTP dan pengelolaan SUML, edukasi konsumen, pelaksanaan pengawasan *post border* dan pengawasan kegiatan perdagangan sebesar Rp32.900.000.000, dan
8. Penyelesaian Sail Tidore yang semula dilaksanakan pada tahun 2021 menjadi 2022 sebesar 20 miliar rupiah.
9. Pengadaan dan pemasangan *chiller* gedung I dan gedung II, *lift* gedung jalan jambu dan pengelolaan sarana dan prasarana gedung Kemendag sebesar Rp36.900.000.000.

Dengan demikian total kebutuhan anggaran Kementerian Perdagangan tahun 2020, sebesar Rp2.281.015.767.000, sehingga pelaksanaan program kerja dan kinerja Kementerian Perdagangan dapat diwujudkan dengan baik sesuai dengan tugas fungsinya, terutama terkait dengan pemulihan ekonomi nasional. Selanjutnya, Kementerian Perdagangan akan menyampaikan usulan tambahan anggaran ini kepada Menteri PPN, Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Besar harapan kami kiranya usulan tambahan anggaran ini mendapat dukungan dari yang terhormat Pimpinan dan Anggota Komisi VI DPRRI.

Bapak, Ibu, Pimpinan, Anggota Komisi VI yang terhormat,

Demikian penyampaian kami secara singkat mengenai pembahasan, pembahasan RKP K/L dan RKA K/L Tahun 2022. izinkan kami untuk memohon dukungan kepada seluruh pimpinan Anggota Komisi VI DPRRI terhadap rencana kinerja Kementerian Perdagangan Tahun 2022.

Izinkan kami untuk memohon dukungan seluruh Pimpinan dan Anggota Komisi VI DPRRI terhadap rencana kinerja Kementerian Perdagangan tahun 2022. Akhir kata, kami haturkan terima kasih setinggi-tingginya.

Wabillahi Taufik Wal Hidayah.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Walaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh.

Baik, terima kasih Pak Menteri atas pemaparannya dan mengingat beliau ada jadwal yang harus didatangi setelah acara kita. Mohon pertanyaan teman-teman agak singkat, padat. Ini yang daftar baru 3 orang, kalau ada yang mau daftar harus segera karena habis ini kita nggak bisa lama-lama.

F-PD (HJ. MELANI LEIMENA SUHARLI):

Daftar Pimpinan, sedikit saja.

KETUA RAPAT:

Ibu Melani. Oke, kita mulai seperti biasa. Pak Andre namanya selalu nomor satu ini. Silakan, Pak.

F-P.GERINDRA (ANDRE ROSIADE):

Pak Menteri, terima kasih.

Assalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Pak Menteri, saya mau mengapresiasi saja kinerja Kementerian Perdagangan. Yang pertama, saya baca di laporan BPS bahwa ekspor bulan April 2021 sudah sebesar 18,48 miliar dolar. Nilai ekspor itu meningkat 0,69% dari bulan Maret 2021 yang sebesar 18,35 miliar. Pun bila dibandingkan secara tahunan, nilai ekspor pada bulan April 2021 balasan tinggi di mabes 51,94% dari 18, dari yang sebelumnya yaitu April 2020. Jadi, intinya Pak Menteri, saya melihat kinerja ekspor sudah meningkat dengan luar biasa ya dari tahun 2020 ke-21 itu meningkat 51,94%.

Bahkan lebih tinggi dari April 2019 yang hanya 13,07 miliar. Jadi, menunjukkan bahwa Pak Menteri dan juga teman-teman Komisi VI, bahwa nilai ekspor yang menunjukkan, kenaikan ekspor yang menunjukkan pulihnya dan bangkitnya perekonomian Indonesia. Dan untuk itu saya mengapresiasi kinerja Kementerian Perdagangan, bahwa Pak Menteri dan jajaran Kementerian Perdagangan sudah mampu meningkatkan ekspor itu perlu diapresiasi dan untuk itu Pak Pimpinan dan teman-teman Komisi VI, saya mengusulkan kita mendukung *wabil* khusus untuk apa anggaran pasar-pasar untuk menggerakkan ekonomi masyarakat itu diminta ke Banggar dan Kementerian Keuangan untuk tidak jangan dipotong. Sehingga, perekonomian Indonesia cepat pulih di tengah pandemi ini.

Itu saja, selamat bertugas Pak Menteri. Saya apresiasi kinerja Bapak dan jajaran yang luar biasa di tengah pandemi.

Terima kasih.

Wassalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh,

Baik, lanjut Pak Darmadi.

F-PDIP (DARMADI DURIANTO):

Terima kasih, Pak Ketua.
Mungkin, beberapa.

Pak Menteri yang terhormat,

Ini kalo saya lihat kan pagu indikatif turun 514 miliar lebih. Nah, mungkin Pak Menteri nanti ceritakan ke kami dampaknya apa sih, kan pasti ada dampak kan, pencapaian target dan sebagainya, ada dampak nggak? Apa malah nanti targetnya naik itu dengan penurunan pagu. Kalau naik ya kita turunkan terus, ya kan. Jadi, kadang-kadang kalau bekerja kepepet tambah produktif, Pak Menteri ya, kadang-kadang. Kalau Pak Sekjen kan pasti minta tambah terus ya. Nah, kita mau lihat dampaknya seperti apa. Misalnya, yang paling besar itu Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional, 42% itu Pak Menteri, turun hampir 175 miliar.

Ini kan kontradiktif dengan bagaimana presiden menginginkan agar kementerian ini bisa menggenjot ekspor. Jangan sampai nanti ujung-ujungnya kan larinya ke fokusnya impor, karena anggaran di ekspor sudah turun terus, pengembangannya nggak ada ya. Dengan penurunan kayak gini, bagaimana untuk ITPC-ITPC yang ada bisa efektif dan produktif Pak Menteri, apalagi katanya mau ditambah tuh ITPC-ITPC beberapa negara. Nah, ini mohon penjelasan. Karena, di saat kita butuh ekspor itu bisa digenjot naik, ternyata anggarannya nih diturunkan paling jauh, bahkan melebihi yang lain. Maka, ada yang ada juga yang naik. BP3 itu apa ya Pak Menteri?

Jadi, bank ya. Oh, ini Pak Auke ya. Kasam. Anak buahnya sudah sembuh Pak dari Covid? Ke Moscow kemarin.

ANGGOTA KOMISI VI:

Udah di klarifikasi nggak ke mana itu Pak.

F-PDIP (DARMADI DURIANTO):

Mau pulang kena Covid ya, luar biasa.

Nah, ini yang pertama Pak Menteri. Yang kedua, itu ramai soal *predatory pricing* Pak Menteri banyak ngomong tuh. Sejauh mana nih progresnya Pak Menteri ya. Seperti apa sih poin-poinnya yang ingin disampaikan untuk mengatur agar tidak terjadi *predatory pricing*. Ini kan

nggak lewat undang-undang kan, nah Peraturan Menteri kan cepat mestinya. Ini sudah lama nih Pak Menteri, nggak keluar-keluar. Kalau undang-undang, ya bisa lama. Kalau ini kan nggak terlalu lama bisa keluar mestinya. Karena, *guiden*-nya di KPPU juga sudah ada. Nah, nanti diajak bicara nggak KPPU ini, soal *predatory pricing*. Mereka kan sudah punya *guiden* yang bagus.

Yang ketiga, saya menyoroti soal, kapan sih Pak Menteri ingin mengajukan undang-undang RUU Perlindungan Konsumen. Ini dari tahun 99, sama kayak KPPU tuh 99. Ini kan sudah usang Pak Menteri. Ya, kalau ada *political will* dari Pak Menteri bisa dipercepat lebih baik loh. Karena, sudah nggak bisa, nggak bisa apa ya, nggak bisa berlaku keadaan sekarang Pak Menteri. Nah, saya minta ini abis BUMN udah melangkah ke persaingan usaha tidak sehat, sama perlindungan konsumen, lemah sekali badan perlindungan konsumen nasional. Ini di bawah Pak Ferry ya, ya. Ini lemah sekali badan ini. Nggak berkutik, nggak bisa berbuat apa-apa. Nah, ini ditinggalkan jadi anak tiri betul ya. Padahal itu anak kandung dua-duanya dari Komisi VI yang dilahirkan di Komisi VI, Pak Menteri. Nah, ini kita minta perhatiannya kepada kedua undang-undang ini biar bisa dipersiapkan dengan baik begitu.

Jadi, itu tiga pertanyaan saya. Terima kasih, Pak Menteri.

KETUA RAPAT:

Baik, terima kasih.

Kita kembali ke Pak Nusron. Oh ya, ya, kalau gitu Pak Lamhot dulu, baru Pak Nusron ya. Dia lagi minum itu.

F-PG (LAMHOT SINAGA):

Iya, saya agak sungkan sama Gus Nusron ini kita harus hati-hati ya. Iya Terima kasih.

**Pimpinan dan Bapak Ibu Anggota Komisi VI yang saya hormati,
Pak Menteri,
Pak Wamen, dan
Seluruh jajaran,
Pak Sekjen, seluruh jajaran Kemendag**

Pertama-tama, saya ingin mencoba menanyakan beberapa yang terkait paparan Pak Menteri tadi di halaman 9 mengenai penguatan destinasi pariwisata, Pak Menteri. Kebetulan, saya ini dari Danau Toba ini, Pak Menteri ya. Saya kira ini sangat relevan terhadap super prioritas yang dicanangkan oleh pemerintah saat ini. Namun, saya ingin menanyakan, Pak Menteri. Ini di belum secara detail, apa sih yang dimaksud dengan penguatan destinasi pariwisata prioritas dengan kegiatan pembangunan revitalisasi pasar. Saya belum mengetahui programnya, konsepnya seperti apa ini dalam penambahan DAK 2022.

Lalu kemudian, saya lihat juga di sini penambahan DAK 2022 tentang pengembangan kawasan *food estate*. Saya kebetulan sebelum Pak Menteri jadi menteri, masih dubes waktu itu. Saya sudah diskusi dengan Wamen, Pak Wamen ini. Kebetulan di dapil kami itu dicanangkan pemerintah menjadi *food estate*. Saya pernah kritisi juga bahwa yang perlu kita pikirkan adalah selain masalah bibit dan sebagainya adalah pasca panen ya. Nah kebetulan, kalau dari berbagai komoditas yang dikembangkan nantinya di dalam *food estate* itu, belum ada satu pemikiran tentang pasca panennya. Bagaimana komoditas-komoditas tersebut bisa diserap di pasar ataupun di market.

Oleh karena itu, di tempat kami yang *food estate* sekarang itu, memang perlu ada satu pasar *perkulakan* yang bisa menampung semua komoditas dari berbagai lahan *food estate* tersebut. Itulah ke beberapa kali diskusi saya coba waktu itu dengan Pak Wamen waktu itu, Pak Menteri waktu itu masih dubes waktu itu. Nah oleh karena itu, saya beberapa kali juga ajak Pak Wamen ini ke tempat kami ke Humbang.

Waktu itu Pak Luhut juga udah pernah sekali, ngajak ya sebelum. Ini betul, ini suatu. Jadi, saya belum pernah lapor ini Gus ke Pak Menteri ini, karena Pak Menteri waktu itu masih dubes, Beliau gitu. Nah terkait hal itu, saya berpikir bahwa perlu ada semacam pusat *perkulakan* yang besar, yang bisa nanti menyerap semua komoditas-komoditas hasil daripada *food estate* ini. Tujuannya apa, tujuannya adalah untuk menyerap komoditas-komoditas ini di pasar, di market yang perlu dikoordinasikan secara langsung oleh Kementerian Perdagangan.

Yang berikut adalah soal sistem resi gudang. Ini juga punya keterkaitan terhadap program-program soal *food estate* ini. Tapi, di samping *food estate* ini saya kira juga program lain itu sangat kuat hubungannya terhadap resi gudang. Ini juga saya kira adalah perlu kita dorong di beberapa daerah, tidak hanya di daerah-daerah yang sekarang dicanangkan oleh Kementerian Perdagangan. Saya kira perlu ada pemerataan, adanya sebuah resi-resi gudang di beberapa daerah, tujuannya itu adalah untuk bisa menyerap komoditas-komoditas dari berbagai daerah.

Oleh karena itu, saya mendukung sekali kegiatan program yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan dalam rangka memperkuat atau pun mendorong terlaksananya Sistem Resi Gudang. Namun, yang saya ingin katakan adalah supaya merata Pak Menteri. Jangan hanya di beberapa daerah, khususnya nanti resi gudang ini adalah yang mempunyai komoditas-komoditas unggulan yang saat ini mempunyai kesulitan akses terhadap market, akses terhadap ini. Sehingga, si petani itu tidak mendapat kemudahan. Nah, pasca adanya resi gudang ini ada kemudahan atau pun akses yang diperoleh oleh para petani kita untuk menjual komoditas itu.

Yang terakhir Pak Menteri adalah soal sosialisasi perjanjian dagang. Ya, dulu Pak Menteri sebelumnya, juga menugaskan Wamen kita ini untuk melaksanakan sosialisasi, perjalanan dengan internasional. Namun, belakangan ini saya mendengar dari teman-teman Komisi VI, ini ada sosialisasi yang dilaksanakan oleh Kementerian Perdagangan terhadap

sosialisasi perjanjian dagang yang sudah kita laksanakan. Nah, oleh karena itu, belum semua dapil, misalnya di kami juga Pak Menteri. Belum ada satu program untuk sosialisasi perjanjian dagang internasional yang dilaksanakan. Oleh karena itu, saya kira ini juga kami didukung ya supaya masyarakat kita tahu bahwa kita punya keterikatan dalam sosialisasi. Dalam perdagangan internasional. Artinya adalah kami mendukung pelaksanaan sosialisasi perjanjian dagang ini secara masif.

Mungkin itu aja Pak Menteri yang bisa saya sampaikan. Saya tahu karena Pak Menteri waktunya sangat sempit katanya. Sebenarnya, saya ingin masih banyak yang mau saya sampaikan, tapi untuk *next* barangkali.

Terima kasih.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Walaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh.

Baik, kita ke Ibu Melani. Silakan.

F-PD (HJ. MELANI LEIMENA SUHARLI):

Terima kasih, Pimpinan.

**Yang saya hormati, Pimpinan dan teman-teman Anggota Komisi VI,
Yang saya hormati, Pak Menteri Perdagangan, Wamen, dan
Sekjen, dan juga jajarannya**

Saya hendak menanyakan di halaman 6. Itu di sini ada pasar rakyat dan gudang non-SRG. Di kebetulan dapil saya di tidak ada pasar ya, tidak terima pasar. Pada waktu itu diganti dengan pemberian gerobak untuk UMKM. Mereka sangat senang sekali sampai ada yang nangis saking senangnya dapat apa namanya gerobak-gerobak itu dan saya minta apakah nanti dianggarkan untuk di Dapil DKI, saya sama Pak Darmadi di sini juga tidak dapat pasar. Mungkin, bisa dialihkan menjadi mendapatkan para UMKM itu mendapatkan gerobak-gerobak dagang.

Kemudian, apakah pusat jajanan kuliner dan suvenir itu bisa kita buat di DKI dengan, dengan kerja sama dengan Menteri Perdagangan, tentunya pusat kuliner jajanan kuliner ini sangat banyak di DKI dan para UMKM memang di DKI lebih banyak untuk dagang kuliner.

Kemudian, saya menanyakan juga Expo Dubai. Expo 2020 Dubai yang akan dilaksanakan tahun 2021 dan 2022, apakah UMKM-UMKM itu ada yang dari Dapil DKI dan bagaimana syarat-syaratnya. Apakah sudah ditentukan atau belum.

Kemudian, karena dengan meningkatnya transaksi *e-commerce* juga memunculkan di sini pengemasan produk *e-commerce* yang banyak menggunakan plastik. Bagaimana tanggapan Pak Menteri Perdagangan, apakah ada solusinya dan pembahasan dengan para *stakeholder* lain untuk menanggulangi ini, karena persoalan itu termasuk menanggulangi persoalan lingkungan hidup.

Mungkin, itu saja Pak Menteri. Terima kasih, Pimpinan.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh.

Baik, lanjut kembali ke Gus Nusron. Sudah siap?

F-PG (NUSRON WAHID):

Siap.

KETUA RAPAT:

Silakan.

F-PG (NUSRON WAHID):

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Saya singkat, padat dan memihak rakyat, Pak.

Pertama, soal optimalisasi perdagangan berjangka komoditi dan SRG. Staf Bapak, Kelapa Bappebti sudah mempunyai peraturan Kepala Bappebti Nomor 5 Tahun 2019, yang kemudian direvisi menjadi Peraturan Kepala Bappebti Nomor 9 Tahun 2019 tentang Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik, Asset, *Crypto Currency*. Ini saya melihat lagi *trend* dan seperti kayak kebun binatang. Uang keluar banyak di Indonesia dan itu pasti mengganggu, tetapi tidak tercatat karena memang belum ada bursanya, dan belum ada peraturan-peraturan teknis yang mengikat dalam transaksi perdagangan. Sementara pada sisi lain, tahun 2022 ini ada target pertambahan transaksi perdagangan berjangka komoditi 10%. Nah, alangkah baiknya kalau seandainya perdagangan *Crypto Currency* ini daripada liar, segera dibursakan.

Yang kedua, di luar sana terjadi tarik-menarik perdebatan apakah *Crypto Currency* ini bagian dari *underline* transaksi aset atau *underline* lain transaksi komoditi, karena kalau *underline* transaksinya aset, pasti *KOT and KOT* nanti tarikannya regulasinya yang mengatur adalah OJK, ya rezimnya rezim di OJK. Tapi, kalau ini masuk dalam kategori rezimnya rezim komoditi, maka *KOT and KOT* nanti akan menjadi rezimnya Bappeti. Nah, saya belum

pernah mendengar *statement* dari Pak Menteri. Sesungguhnya ini, barang ini ini, mau dibawa ke mana, karena di luar sana sudah sangat liar dan aturan mainnya ke mana, supaya devisa kita tidak terlalu banyak keluar, tapi sedikit banyak itu sirkulasinya supaya kita ini di dalam tentang aturan main ini. Ini yang pertama.

Kemudian yang kedua, tentang indeks parameter konsumen cerdas. Nah, saya nanti karena ini rapatnya tentang RKA K/L, tidak pas kalau kemudian saya tanya ini, nanti saya minta penjelasan. Dijawab tertulis nanti nggak apa-apa, parameter dan definisi konsumen cerdas itu dan bertanggung jawab itu kayak apa. Jangan apakah konsumen cerdas itu selama ini kan identik dengan membeli barang yang ingin murah, meskipun tidak standar. Tapi, bagaimana dengan barang selundupan. Apakah itu orang yang membeli barang selundupan itu bagian dari konsumen cerdas apa tidak. Sementara dalam transaksi HP, makin cerdas orang itu kalau dia makin membeli barang yang selundupan, karena murah. Nah, ini sudah dibuat gaya hidup.

Saya itu aja Pak, saya hanya satu aja masalah. Oh yang terakhir ke Pak Suhanto, ya kan. Ini kok pagunya turun? Ini semua diturunkan oleh Menkeu atau ada sanksi. Karena serapan yang tidak tepat atau apa maka diturunkan.

Itu aja, Pak. Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik, terima kasih. Kita lanjut ke Bapak Singgih.

F-PG (H. SINGGIH JANURATMOKO, S.K.H., M.M.):

Makasih, makasih Pimpinan.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pak Menteri, tadi kita saya kan urusannya cuma ayam dan telur, Pak. Jadi, menanyakan ayam dan telur aja, Pak.

Jadi gini, Pak. Kemarin kan terjadi permasalahan untuk harga jagung yang mahal sampai harga 6.200, Pak. Kondisi ini kan sebenarnya tiap tahun bisa diprediksi, bulan-bulan apa yang harga itu akan mahal. Teman-teman kemarin sampai cari jagung aja sukar. Itu kita mohon nanti di waktu-waktu yang bisa diprediksi nanti harga jagung itu akan mahal, ada antisipasinya Pak. Kemarin dari teman-teman timsar itu, eh teman-teman koperasilah intinya.

Ada berapa koperasi itu mengusulkan untuk operasi beri *anu* diberi hak apa yang diberi perlakuan khususlah bisa impor, impor jagunglah khusus untuk anggotanya, salah satu usulannya gitu, Pak. Kemarin kita, nah itu juga tidak tidak selalu di waktu setahun sepanjang tahun Pak, tapi waktu-waktu di di mana petani itu tidak panen, Pak. Jadi, tidak akan mengganggu harga komoditi- komoditi jagung di petani. Itu nomor satu, Pak. Mohon nanti bisa

diantisipasi ke depannya, jangan sampai tiap tahun itu ribut aja jagung itu Pak.

Yang kedua Pak, karena harga kemarin kan semua bahan baku juga naik, Pak. Patokan kita kan, patokan harga referensi kemarin memang itu nggak, itu hukum pasar ya Pak, naik turunnya. Tapi yang selalu untuk patokan untuk Satgas pangan Pak, itu kan harga di harga referensi itu Pak, harga PPN-nya sudah mahal sekarang Pak, untuk ayam telur udah di angka 2.000, hampir 19 hampir 2.000. Sedangkan, harga referensinya kan cuma 19-21, itu kan bener-bener kalau di perternak rugi, Pak. Kita harapan kita, walaupun itu tetep pengaruh *supply demand*, tapi kalau harga referensi karena PPN mahal, ya bisa referensinya itu dinaikkan Pak minimal begitu itu Pak. Karena apa Pak, karena nanti kalau teman-teman tuh sering kalau udah di atas harga 22, 23 itu sering ditelpon sama Satgas pangan. Itu kan kasian mereka, mereka betul-betul ciutlah nyalinya, Pak.

Jadi, itu aja Pak yang kita tanyakan. Mohon bisa ditindaklanjuti. Terima kasih, Pak.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Walaikumsalam.

Bapak Hakim.

F-PAN (ABDUL HAKIM BAFAGIH):

Terima kasih, Pimpinan.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

**Yang saya hormati Pimpinan dan Anggota Komisi VI, baik yang hadir secara fisik maupun yang secara virtual,
Yang saya hormati Pak Menteri Perdagangan,
Pak Wamen beserta seluruh jajaran**

Minal Aidin Wal Faizin, mumpung masih syawal.

Pak Menteri, saya mulai dari mungkin mengacu di Undang-Undang Nomor 7 2014 tentang Perdagangan. Di situ di Pasal 3 dijelaskan tujuan perdagangan adalah meningkatkan pertumbuhan nasional, meningkatkan penggunaan dan perdagangan produk dalam negeri, meningkatkan kesempatan berusaha dan menciptakan lapangan kerja.

Nah, kalau kita melihat dengan kondisi pandemi ini, beberapa UMKM itu bisa *survive* karena menggunakan sarana teknologi. Jadi, memanfaatkan kemudahan-kemudahan daripada kecanggihan teknologi itu sendiri. Akan tetapi Pak Menteri, beberapa bulan ini, akhir-akhir ini itu banyak yang

mengeluh karena banyak produk dari luar, dari luar Indonesia, itu yang masuk Indonesia harganya bisa lebih murah daripada yang ada di Indonesia, bahkan ongkos kirimnya itu bisa jauh lebih murah daripada yang jual di Indonesia itu sendiri. Nah, ini kan otomatis menyalahi undang-undang, Pak Menteri.

Nah, yang ingin saya tanyakan satu, kenapa bisa seperti kenapa bisa kejadian seperti itu dan yang kedua, antisipasi daripada Kementerian Perdagangan terkait fenomena seperti ini, itu bagaimana. Karena, jangan sampai kita menargetkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, Kementerian Perdagangan punya program yang bagus, tapi tidak bisa mengantisipasi kejadian seperti ini, ini malah berimbas jelek, ini malah berimbas terhadap pertumbuhan ekonomi dalam negeri kita sendiri dan yang dikorbankan adalah UMKM di negeri kita.

Mungkin, dua pertanyaan itu saja Pak Menteri, singkat. Terima kasih.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Baik, terima kasih.

Ini yang dari daftar pertanyaan sudah habis. Ada lagi atau langsung kita minta tanggapan Pak Menteri ya, silakan pak.

F-PDIP (I NYOMAN PARTA, S.H.):

Yang *online*, Pimpinan. Pimpinan, Pimpinan *online*.

KETUA RAPAT:

Ya, siapa.

F-PDIP (I NYOMAN PARTA, S.H.):

Pak Nyoman, Pak Nyoman.

KETUA RAPAT:

Oke, Pak Nyoman dulu sebentar Pak Menteri.

F-PDIP (I NYOMAN PARTA, S.H.):

Iya, terima kasih Pimpinan.

Selamat sore menjelang malam juga Pak Menteri.

Saya mau bertanya beberapa hal. Yang pertama, kedengaran ya.

KETUA RAPAT:

Ya, silakan Pak dilanjut. Agak cepat.

F-PDIP (I NYOMAN PARTA, S.H.):

Iya, terima kasih.

Yang pertama tentang dana yang masih diblokir. Itu kan program-program yang hampir sebagian besar menyentuh persoalan rakyat. 307 M itu dananya besar sekali. Kira-kira itu akan bisa dibuka apa sampai habis Tahun Anggaran 2021 ini tidak akan dibuka, Pak. Pasti kalau itu tidak dibuka, pasti ada resiko. Mungkin, proyeknya sebagian sudah berjalan, programnya sebagian sudah berjalan danantisipasi kalau terjadi persoalan hukumnya.

Yang kedua, tentang pasar tipe D. Mohon maaf ini kalau di dapil kami, ini untuk tipe D, itu tempatnya di desa adat. Di desa-desa itu membutuhkan lahan 2.000 meter, kalau di Bali 20 are itu tidak mungkin, Pak. Paling lahannya ya 10 are sudah sangat, sudah sangat besar itu, walaupun pedagangnya sudah 100, tetapi lahannya. Oleh karena itu, mohon ini di, di ada kebijakan sedikit agar persoalan lahan nya, karena pasarnya sudah *existing*, tinggal tempatnya yang memang belum bagus, perlu revitalisasi. Barangkali memang tidak harus 2.000 meter tanahnya.

Yang ketiga tentang pagu indikatif yang berkurang cukup besar ini. Pada umumnya di kementerian maupun lembaga, kalau ada program-program yang belum terlaksana, saya pernah tahu di Kementerian Agama yang bukan bidang kita, bukan bidang Komisi VI, itu juga dikurangi. Karena, dana sebelumnya juga tidak terserap dengan baik. Ya, kira-kira apa karena faktor itu dikurangi atau karena ada pertimbangan yang lain. Mohon nanti dijelaskan.

Yang terakhir Pak Menteri, terima kasih. Karena, di tahun 2021 khususnya sampai bulan Juni ini, kementerian tidak, tidak jadi mengimpor beras. Jadi, terima kasih. Salam hormat saya, karena program kegiatan itu tidak jadi dilakukan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik, silakan Pak Menteri memberi tanggapan.

MENTERI PERDAGANGAN:

Terima kasih, Bapak Pimpinan.

Menjawab pertanyaan Pak Andre Rosiade, memang pada bulan April 2021 ekspor nonmigas kita mencapai 18,48 miliar dan ini naik 0,6% dibandingkan tahun Maret 2000, Maret 2021. Jadi Pak Pimpinan, ini adalah rekor tertinggi kita untuk ekspor nonmigas di 12 tahun terakhir, atau ini sebenarnya sepanjang masa adalah yang tertinggi. Tetapi, hal yang paling penting mesti di ingatkan adalah memang kita masuk ke dalam namanya

Super Cycle komoditas. Jadi, memang harganya ini semua komoditas-komoditas kita ini naik hampir *record-breaking*. Harga kelapa sawit kita hari ini lebih dari 1.200 dolar, kemudian harga batu bara kita hampir mencapai 100 dolar dan ini menyebabkan angkanya naik.

Tetapi pada saat yang bersamaan Bapak Pimpinan, kita juga bisa lihat Pak Andre Rosiade, kita bisa lihat bahwa ada juga industri-industri yang naik luar biasa terutama untuk industri produk baja yang kalau kita lihat ekspornya tahun 2020 itu adalah 10,86 miliar dan ini merupakan ekspor ketiga terbesar nonmigas Indonesia.

Pada Kuartal pertama tahun 2021 kenaikan daripada komunitas besi baja kita ini naik lebih dari 60%, bahkan hampir 61% dibandingkan kuartal yang sama pada tahun 2020. Ini menunjukkan bahwa terjadi evolusi daripada Indonesia yang tadinya menjual bahan mentah dan barang setengah matang, setengah jadi, menjadi barang industri dan industri berteknologi tinggi.

Saya terima kasih Pak Andre Rosiade, dan ini merupakan sebuah kegiatan yang kita akan jalankan, dan menurut prediksi kami di masa-masa yang akan datang ini akan tumbuh industri ini dan industri berteknologi tinggi ini akan, akan sejajar naiknya dengan realisasi investasi terutama investasi yang besar-besarnya, yang jumlahnya berada di luar pulau Jawa sekarang ini bahkan di timur Indonesia seperti, di Maluku Utara, di Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, dan sekarang yang lagi kita pikirkan adalah bagaimana supaya disiplin daripada hilirisasi daripada komoditas barang-barang pertambangan kita ini juga didukung oleh teknologi, terutama listrik, energi yang ramah lingkungan dan mungkin mempunyai *carbon print* sama dengan nol pada waktu yang tidak terlalu lama.

Jadi, sekarang kita insentifikan, memastikan bahwa barang-barang ini bisa dijual dengan baik dan ini kita melihat struktur daripada penjualannya, ini barang Cina, teknologi Cina, investor Cina, dijual balik ke Cina dan sekarang ini Pak Andre, kita tahun 2020 memotong defisit perdagangan kita dengan Cina, menjadi separuh, jadi 7,5 miliar dolar hanya dengan satu komoditas, yaitu *stainless steel*. Jadi, artinya disiplin kita dalam hilirisasi pertambangan kita bisa dinyatakan bisa menjadi sukses sekali di masa yang akan datang. Saya terima kasih.

Pak Darmadi, kalau saya boleh kasih contoh kenapa di Dirjen PEN turun 175 miliar, karena memang kita mendapatkan program istimewa tahun lalu, yaitu untuk mensukseskan daripada Dubai Expo tahun 2020, jumlahnya 100, 250 miliar pada saat itu memang istimewa. Jadi, karena Exponya tahun depan tidak ada, jadi terjadi penurunan yang cukup tajam.

Tetapi, kami bisa jamin kalau misalnya penambahan tadi 280 miliar, ada sebagian besar ditaruhkan di Dirjen PEN kalau tidak salah 63 miliar, itu memang untuk bagian daripada negosiasi untuk sebenarnya dalam proses pengalihan, Pak Darmadi. Kita bisa contoh misalnya kita punya kantor bukan ITPC, tapi up deck di Copenhagen itu sudah kita tutup, kita ganti menjadi ITPC up deck di Turki. Jadi, ini ada yang memang daerah-daerah yang kita

anggap sudah tidak relevan lagi, kita akan pindah dan kita akan carikan di tempat-tempat terbaru.

Yang di Dubai, ITPC Dubai. Sudah, sudah jalan, jadi gini Pak, kalau di Dubai itu lebih kepada administrasi. Jadi, memang tempatnya itu tidak, tidak baik, itu sekarang kita sudah pindah di daerah yang lebih baik dan sekarang mereka mempunyai tugas khusus dan kita sedang mencoba *expended* perjanjian perdagangan dengan Uni Emirat Arab dan *insya* Allah kita akan selesaikan pada akhir tahun ini sesuai dengan *national day* Indonesia pada Dubai Expo 2020 tersebut, gitu Pak.

Kemudian Pak Darmadi, saya ini juga disatukan dengan pertanyaan Pak Hakim tadi, terutama urusan perlindungan konsumen dari pada *predatory pricing*. Bapak dan Ibu, sebenarnya kami sudah siap melaksanakan Permendag ini, tetapi ada permintaan untuk kita melihat masalah *e-commerce* atau digitalisasi hilirisasi dan digital ekonomi secara menyeluruh yang lebih komprehensif.

Rencananya kita akan keluarkan pada kesempatan pertama bulan Juni ini untuk masalah daripada *predatory pricing* terutama kegiatan-kegiatan hal yang curang yang dilaksanakan oleh banyak media terutama loka pasar yang sudah kejadian. Jadi, memang ini merupakan suatu permasalahan, karena memang tidak dilarang, gitu ya Pak ya. Jadi, mereka mengerjakan.

Nah, sekarang ini kita akan atur, kita akan larang. Karena, yang banyak kena itu adalah UMKM terutama IKM, Industri Kecil Menengah ini mendapat menjadi sasaran daripada struktur yang dihancurkan. Jadi, Pak Darmadi, saya akan lapor pada kesempatan pertama bulan Juni ini, kita sudah siap sebenarnya, kita cuman memastikan supaya ini bisa lebih baik.

F-PDIP (DARMADI DURIANTO):

Pak Pak Menteri.

MENTERI PERDAGANGAN:

Iya.

F-PDIP (DARMADI DURIANTO):

Bapak di dalam peraturan itu kan nanti mendefinisikan *predatory pricing*.

MENTERI PERDAGANGAN:

Predatory pricing.

F-PDIP (DARMADI DURIANTO):

Oke, gini Pak. Saya pingin tahu aja, bagaimana Bapak bisa eliminir dengan permen. Karena, *predatory pricing* itu ada di undang-undang, Pak. Ada di Undang-Undang 5 99. Bapak keluarkan Permen dengan merubah definisi kan nggak bisa mengalahkan, Pak struktur undang-undang permen kan di bawah.

MENTERI PERDAGANGAN:

Iya, iya.

F-PDIP (DARMADI DURIANTO):

Undang-undang.

MENTERI PERDAGANGAN:

Kita tidak akan melawan undang-undang, Pak Darmadi.

F-PDIP (DARMADI DURIANTO):

Iya artinya kalau bapak nggak rubah definisi *predatory pricing*, Bapak masih tetap seperti yang di Undang-Undang 5 kan mengandung kelemahan. Bapak harus merevisi itu dalam undang-undang, Pak.

MENTERI PERDAGANGAN:

Iya, tapi gini Pak.

F-PDIP (DARMADI DURIANTO):

Karena, Permennya nggak kuat.

MENTERI PERDAGANGAN:

Gini, kalau kita rubah undang-undangnya Pak, ini akan memakan waktu. Sedangkan Pak Darmadi, kalau ini didiamkan, itu industri pakaian muslim wanita terutama habis, Pak.

F-PDIP (DARMADI DURIANTO):

Itu saya ngerti Pak.

MENTERI PERDAGANGAN:

Iya.

F-PDIP (DARMADI DURIANTO):

Tetapi, ini kan kita bicara mengenai kepastian hukum, penegakan hukum. Jangan sampai dalam.

MENTERI PERDAGANGAN:

Ada yang masalah Pak pada Undang-Undang Nomor 9 itu, ada yang masalah?

F-PDIP (DARMADI DURIANTO):

Nggak, yang nomor 99 itu kan *predatory pricing* definisinya itu kan sebetulnya agak sulit Pak, Nomor 5, 99. Menjual rugi di bawah harga pasar, itu kan, *even* KPPU sendiri kan kasusnya itu nggak terlalu banyak yang bisa diungkapkan lewat situ. Artinya, didefinisi itu sebetulnya nggak lengkap, mengandung kelemahan. Kan Bapak kan berubah definisinya lewat Permen, kan nggak bisa Pak.

MENTERI PERDAGANGAN:

Kita, gini Pak. Kita nggak mengidentifikasi *predatory pricing*. Tapi kita akan atur supaya orang tidak melaksanakan *predatory pricing*. Caranya adalah mengatur diskon, mengatur daripada loka pasar, *cross border* dan loka pasar domestik.

F-PDIP (DARMADI DURIANTO):

Tapi, *issue*-nya kan tetap *predatory pricing* di Bapak, ya kan. Nggak, saya hanya ingin pingin gitu Pak. Bagaimana Bapak jalan paralel, undang-undangnya disiapkan.

MENTERI PERDAGANGAN:

Iya iya, kita akan

F-PDIP (DARMADI DURIANTO):

Artinya, jangan ngandalin Permen. Nanti, nggak efektif juga.

MENTERI PERDAGANGAN:

Iya jadi gini, Pak. Ini sekarang kita lagi coba. Kan ini karena karena begini. Dicoba di undang-undang, kemudian diturunkan kepada PP, kemudian Permennya, Pak. Nah, sekarang ini kita lagi cari cantolan-cantolannya supaya *emergency break* ini bisa kita laksanakan pada kesempatan tertentu.

F-PDIP (DARMADI DURIANTO):

Nah, itu maksud saya Pak. Bapak agak harus agak *push* di Undang-Undang Persaingan Usaha Tidak Sehat.

F-PG (NUSRON WAHID):

Pak Ketua, interupsi Pak Ketua.

Kita mau pendalaman panjang atau gimana ini? Karena ini, kita belum sholat. Pak Menteri juga belum sholat. Tadi, ini saya duduk di sini dengan harapan, ini main cepet, terus saya sholat, terus pulang gitu. Tapi, kalau mau ini di pedalaman ya.

F-PDIP (DARMADI DURIANTO):

Nggak apa-apa, sebentar lagi Pak Nusron.

F-PG (NUSRON WAHID):

Kita *break* sholat dulu gitu. Maksud saya gitu,

F-PDIP (DARMADI DURIANTO):

Nggak, ini aja. Saya hanya ingin mengatakan mohon dipercepat aja Undang-Undang Persaingan Usaha Tidak Sehatnya dirubah, gitu loh Pak. Itu kan jalan paling pintas.

Demikian, Pak Nusron. Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Tapi memang undang-undang itu sebenarnya usulan kita, yang kita belum dikasih selesai kalau belum selesai Undang-Undang BUMN.

Oh iya iya iya, kita selesaikan. Itu sesinya bukan APBN.

Ada lagi Pak Menteri?

MENTERI PERDAGANGAN:

Ya, saya ingin menjawab Pak Lamhot secara singkat. Jadi, memang yang kita kerjakan ini adalah penguatan untuk pariwisata terutama untuk pusat kuliner Pak dan ini kita ada 10 destinasi, yaitu Labuan Bajo, Danau Toba, Morotai, Mandalika, Likupang, Borobudur, Tanjung Lesung, Kepulauan Seribu, Bromo dan Wakatobi. Jadi, ini kita akan masukkan apa namanya dengan, dengan destinasi yang dari Kementerian Perdagangan adalah kulinernya supaya bisa dikerjakan.

Kemudian untuk *food estate* Pak Lamhot, kita ingin bahwa ini adalah memang *size*-nya adalah *size* korporasi, jadi industri. Karena, industri ini dari hulu sampai hilir pasti akan dikerjakan. Karena, enggak mungkin kalau *food estate* apa namanya pasca panennya tidak dikerjakan dan memang pasca panen ini adalah sesuatu yang memang kita harus selesaikan pada kesempatan pertama, karena sebenarnya banyak kehilangan di pasca panen tersebut supaya bisa dijalankan. Nah.

F-PG (LAMHOT SINAGA):

Itu bentuknya pasar atau apa itu, Pak Menteri.

MENTERI PERDAGANGAN:

Apa?

F-PG (LAMHOT SINAGA):

Bentuknya pasar?

MENTERI PERDAGANGAN:

Oh gini, pasca. Pasca panennya ini di sini adalah yang saya utarakan ini adalah bagian dari pada penyelesaian panen. Jadi gini Pak, misalnya seperti beras gitu ya. Itu logi, banyak orang yang mengatakan bahwa kehilangan pasca panen itu 10%, kalau saya melihatnya lebih. Kenapa, karena harga beras gabah kering giling panen itu 4.200, harga beras medien itu 8.200 sampai 8.600. Berarti Rp 4.000, artinya sebenarnya kalau kita bisa efisiensi kan pendapatan petani ini juga akan jauh lebih besar, Pak Lamhot.

Nah, ini yang kita akan bereskan yaitu pengeringan dan juga langsung dengan dengan penggilingan yang sekaligus supaya lebih efisien daripada harga tersebut. Nah, pasarnya itu Pak Lamhot, ini nanti kita akan kita akan kerjakan sebenarnya sudah mulai dengan proses destruksi dengan teknologi tersebut, karena ini akan terjalin secara natural dan ini yang sudah dikerjakan oleh misalnya kayak tanihub, sayurbox, ini mereka sudah mengerjakan hal-hal tersebut. Jadi, tanpa kita ajukan ini sudah dijalankan secara, secara, secara natural, gitu loh Pak.

Tetapi, pasar itu nanti akan terjadi dan pasar itu akan ditentukan nanti dengan sistem elektronik yang sudah kita lihat, *movement*-nya ini sudah mulai berjalan ke sana dan itu kita juga sebenarnya kita sedang menggalakkan resi gudang ini untuk memastikan, ketika harga panen harga jatuh itu, petani punya daya daya tawar khusus karena kita bisa simpan 3-4 bulan ke depan dan ini Pak Wamen seperti Pak Lamhot katakan, kita sedang intensifikasi masalah itu supaya bisa berjalan dan sosialisasi ini juga apa perdagangan ini juga kita kerjakan. Ya mudah-mudahan bisa mencapai ke daerah tujuan di tempat Pak Lamhot, konstituen yang berada.

F-PG (LAMHOT SINAGA):

Berarti Pak Menteri, yang yang *food estate* itu berarti SRG ya, Sistem Resi Gudang ya.

MENTERI PERDAGANGAN:

Bukan hanya resi gudang, Pak. Tetapi nanti, lebih besar dari itu. Karena, gudangnya semua lebih banyak, gitu loh Pak. Jadi, pasti nanti akan menciptakan pasar baru.

Bu Melani, saya minta tolong Pak Sekjen untuk menjawab masalah gerobak dan pasar kuliner terutama di DKI Jaya. Silakan, Pak. Daerahnya sama. Iya iya.

SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERDAGANGAN:

Terima kasih atas izinnya, Pak Menteri, Pak Ketua.

Bu Melani, memang DKI ini selama ini kalau kita kasih anggaran pasar tidak pernah mau. Jadi, bukan nggak kasih. Berapa kali kasih anggaran menolak. Jadi, intinya kalau untuk gerobak memang kita sementara ini hanya di destinasi wisata mendukung program nasional 10. Namun, kami akan coba Bu nanti apa namanya menyisihkan dari untuk, karena DKI tidak mendapatkan pasar, kita usahakan seperti yang kemarin Ibu Melani lakukan.

Terima kasih.

F-PD (HJ. MELANI LEIMENA SUHARLI):

Pokoknya DKI ya, pasar kuliner juga begitu ya Pak, jajanan kuliner. Kuliner.

SEKRETARIAT JENDRAP KEMENTERIAN PERDAGANGAN:

Pasar kuliner kita nanti kerja sama dengan Pemerintah Daerah, Bu. Dengan Pemda, kita sudah akan merencanakan beberapa tempat dengan Pemda, nanti kita koordinasi dengan Pemda DKI, Bu.

F-PG (NUSRON WAHID):

Bu Melani diganti pasar kuliner di depan Masjid Istiqlal nanti.

MENTERI PERDAGANGAN:

Bu Melani untuk Dubai Expo, ini ada perbedaan sedikit daripada eks, daripada eksposisi-eksposisi sebelah yang lain. Jadi, Dubai Expo itu bukan jualan barang, tetapi *men-show case* daripada sivilisasi tentang Indonesia. Indonesia dari mana, sekarang bagaimana, dan ke depannya mau apa dan itu nanti ditunjukkan di dalam Expo ini. Jadi, ini bukan jualan barang Bu Melani, tetapi ini lebih terhadap bagaimana tentang *show case*, tentang Indonesiannya, tentang sivilisasi Indonesiannya. Jadi, memang tidak ada pedagang-pedagang yang ikut jualan di situ. Kalau ada pun, nanti itu hanya bagian kecil daripada kopi atau yang mendukung daripada eksposisi Indonesia tersebut. Bu Melani, saya yang plastik nanti kita mungkin pendalamannya saya tulis aja bagaimana caranya kita menangani masalah plastik termasuk lingkungan tersebut ya.

Pak Gus Nusron, saya memang ini adalah bagian dari pada aset kripto. Tetapi, kita akan keluarkan bursanya pada kesempatan pertama, kita akan atur. Karena, ini kan ada keterkaitan antara bursa, pusat kliring dan otoritasnya sebaliknya laksanakan, kita akan jalan paling lambat akhir tahun ini. Tapi, saya mohon Pak Wamen, karena ini beliau yang mengerjakan, dia akan apa namanya akan ikut menjawab dan pada saat yang bersamaan untuk konsumen cerdas ini kita akan tulis jawaban secara tertulis. Saya persilakan, Pak Wamen.

WAKIL MENTERI PERDAGANGAN:

Baik, terima kasih Pak Mendag. Izin.

Pak Ketua dan teman-teman Komisi VI,

Saya jawab yang dari Pak Nusron dulu, sesuai tadi yang Pak Mendag sampaikan. Pertama, tadi soal *crypto* Pak Nusron. Jadi, memang ini rencananya betul yang Pak Mendag bilang, akhir tahun ini Pak Nusron, paling lambat akan dibentuk bursa. Karena kita juga berpandangan sampai dengan yang Pak Nusron bilang, bahwa sirkulasi dan juga arusnya harus banyak di dalam negeri ketimbang kita harus di luar negeri dan kita ingin memastikan bahwa aset *crypto* ini adalah komoditas, bukan mata uang. Banyak mungkin ada *miss* persepsi di masyarakat bahwa yang mengatakan bahwa *crypto* ini bisa digunakan sebagai mata uang tidak, karena sesuai dengan undang-undang mata uang yang berlaku hanyalah rupiah dan itu kita tegas di situ.

Nah, oleh karena itu, pusat pengaturannya adalah di Kemendag melalui Bappebti, sebagaimana kita ketahui kalau pasar uang itu BI pengaturannya, pasar modal OJK. Makanya, kalau *crypto* itu adalah di Bappebti, dan mengingat transaksinya juga sudah luar biasa, ini per hari ini kita lihat data yang kami terima itu di Bappebti transaksi untuk per harinya itu, Pak Nusron itu untuk arus lalu lintas *crypto* itu, itu mencapai 1,7 triliun rupiah dan itu sangat potensial dan kita bisa lihat bagaimana nanti sumber bisa digunakan juga untuk pemasukan untuk negara dan hal-hal lain dan kita bangga juga kalau lihat komoditasnya kita banyak, kenapa teman-teman atau pelaku harus main di luar. Kenapa tidak di Indonesia dan kalau jadi nanti buat di akhir tahun ini, Indonesia akan menjadi negara pertama yang bursanya itu diatur oleh pemerintah. Kalau negara-negara lain tidak ada, bahkan di Amerika itu masih swasta dan bahkan di Tiongkok itu dilarang.

Nah, kita kalau bisa berpotensi untuk menguntungkan dan *beneficial* buat kita, kenapa tidak. Selama regulasinya seperti yang Pak Nusron bilang, diatur dan dibuat lebih *regulated*.

Lalu izin, Pak Mendag. Saya ingin menjawab Pak Lamhot juga tadi, soal SRG, Pak Lamhot. Betul tadi yang disampaikan. Kami kerjanya, kebetulan saya banyak keliling daerah atas saran Pak Menteri juga. Kami baru kemarin dari Sulawesi Tenggara. Kemarinnya lagi itu dari Kabupaten Lima Puluh Kota di Sumatra Barat dan kita jadwalkan ke tempatnya Pak

Lamhot, di Sumatra Utara, Pak Mendag dan nanti itu kita memastikan bahwa SRG-nya jalan. Sebagaimana diketahui mungkin ada 20 komoditas yang bisa di SRG-kan.

Itu banyak sekali *list*-nya dan itu seperti Pak Mendag katakan, digunakan sebagai instrument tunai jual. Jadi, pada saat panen harganya turun, petani bisa simpan di gudang, 3-6 bulan baru jual pada saat harganya itu sudah membaik dan itu juga untuk menghindari tengkulak, Pak Lamhot. Ada banyak 20, nanti saya bisa sampaikan *list*-nya, gabah, beras, jagung, palah, kopi, koprak dan seterusnya dan saya yakin ditempatnya Pak Lamhot itu ada juga yang termasuk di situ, termasuk yang saya laporkan ke Pak Mendag di Humbang Hasundutan, Pak Mendag.

Dan berikutnya soal sosialisasi perjanjian dagang. Beberapa kali kami juga mengajak teman-teman Komisi VI. Kemarin, kami sosialisasi di sempat di Cikarang, lalu sempat di Bandung, lalu di Jakarta terakhir ini bersama dengan Pak Dirjen PPI juga dan juga teman-teman dari PPI atas saran Pak Mendag juga, kami memastikan bahwa perjanjian dagang itu yang sudah diselesaikan baik di ratifikasi maupun juga, tapi permentasi itu harus dirasakan manfaatnya dengan mengundang para pelaku dan salah satunya kami hanya ketemu teman Komisi VI yang ada di dapil bersangkutan. Sehingga, juga ikut bersama-sama untuk mensosialisasikan.

F-PG (LAMHOT SINAGA):

Sumatra Utara belum, Pak.

WAKIL MENTERI PERDAGANGAN:

Nanti kita jadwalkan. Izin Pak Pimpinan.

Terima kasih.

F-PG (NUSRON WAHID):

Pak, setengah menit Pak. Setengah menit, mohon izin.

Saya pernah ikut webinar Pak, yang diikuti oleh Gubernur BI. Katanya mengatakan bahwa yang mengatakan aset *crypto* itu komoditi nggak punya dalil begitu, nggak punya dalil. Kenapa, karena *crypto* ini alat tukar dan alat bayar. Karena, alat tukar dan alat bayar yaitu rezimnya menjadi rezim moneter. Karena berdampak pada sirkulasi neraca *currency*, neraca *anu* neraca perdagangan, neraca, neracalah hasil transaksi, transaksi berjalan begitu. Nah karena itu, BI juga akan mengatur Pak. Saya khawatir nanti ini tumpang tindih terhadap terlalu banyak regula, terlalu banyak peraturan yang mengatur. Saya hanya butuh *statement* ini kalau bisa cepet-cepetan Pak antara BI sama Menteri Perdagangan. Saya juga berharap ini di Menteri Perdagangan, Pak jangan di BI. Kecuali, saya Komisi XI saya berharap ini di Komisi, di BI Pak gitu Pak.

Terima kasih, Pak.

MENTERI PERDAGANGAN:

Jadi, gini Pak Gus Nusron. Jadi, kalau BI itu adalah alat bayar di undang-undang yang ada di Indonesia adalah rupiah. Jadi, beda mata uang. Jadi, dia begitu dollar sebenarnya, itu sudah bukan alat bayar lagi di Indonesia. Maka, dollar itu harus keluar dari dari supervisi BI dan adanya di komoditi, gitu loh Pak namanya forex. Nah, itu ada di Undang-Undang BI sendiri, Undang-Undang Mata Uang. Jadi, ini yang menyebabkan dia tidak bisa mempunyai supervisi, karena memang tidak dalam bentuk, dalam bentuk rupiah. *Anything else than that* itu harus di luar, gitu Pak Nusron.

F-PG (NUSRON WAHID):

Sangat cerdas, Pak Menteri.

MENTERI PERDAGANGAN:

Gus Nusron. Nah, Pak Singgih udah jalan orangnya.

Jadi, iya Pak Hekal ini masalah dari pada masalah unggas ini, saya sedang punya komitmen sampai hari minggu kemarin, saya sudah panggil pemain-pemain utama di unggas ini. Saya komitmen adalah akan mengerjakan ini dengan Dirjen PKH, Pak Nasrullah di Kementerian Pertanian untuk memastikan bahwa unggas ini harus harganya rata, stabil, tidak seperti sekarang. Sebagian waktu adalah rugi besar dan ketika untung, *diuber-uber* oleh satgas pangan. Jadi, saya memastikan bahwa ini akan rata harganya dan memang memang kemarin ini karena harga jagung tiba-tiba melonjak dari Rp 4.000 menjadi Rp 6.200 menjadikan sangat sulit dan ini.

Hah? Komoditas super *sale*, Pak. Sama dengan kedelai, sama dengan kelapa sawit sebenarnya. Jadi itu, super *sale* semuanya naik dan ini menyebabkan harga relatif tinggi di mana-mana.

Pak Hakim, saya seperti saya utarakan tadi. Kita akan bereskan masalah daripada teknologi ini, memastikan bahwa perdagangan antara *e-commerce* di loka pasar baik itu *online* maupun *offline*, mempunyai kesetaraan. Jadi, antara *online* sama *offline*, mereka nggak boleh bunuh-bunuhan. Tetapi, *online* sama *offline* juga ada kesetaraan. Karena, kita ingin mendapatkan perdagangan yang adil, yang bermartabat dan mempunyai manfaat. Karena, kalau tidak mempunyai manfaat untuk konsumen dan kepada industri penyelenggara ini, ini juga tidak sehat dan ini kita akan kita akan rapihkan. Sementara, kita akan bereskan di Permendag 50nya, kita akan jalan kepada PP 80 dan mudah-mudahan kita akan perbaiki Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99 itu.

Apa? Iya, pokoknya kita akan kerjakan bersama. Karena, kalau kita tidak kerjakan bersama, ini *injure*-nya ini bisa rusak semua industri dan infrastruktur perdagangan nasional.

KETUA RAPAT:

Silakan, Pak Hakim.

F-PAN (ABDUL HAKIM BAFAGIH):

Nitip itu, Pak Menteri ya. Karena, soalnya teman-teman saya banyak yang ngeluh semua itu. Rata-rata pelakunya itu kan di generasi-generasi saya gitu Pak. Kasihan itu, Pak.

MENTERI PERDAGANGAN:

Persis. Jadi, saya ini sekarang, kemarin sudah mau dikeluarkan bulan Maret, tetapi kita lihat sama-sama, kita ingin lihat arsitekturnya. Jadi, saya perlu waktu 2 bulan untuk memberikan gambar arsitekturnya. Nah, sekarang ini saya kalau nanti ada waktunya, kita akan lihat bagaimana kurva eksnya jalan, kita ini masih di dasar. Jadi sebenarnya, kalau kita mesti mengadakan adalah hari ini untuk membereskannya. Karena, hah?

Udah udah siap, udah siap. Ini udah hampir final. Jadi, kita mau beresin. Begitu dapat persetujuannya, kita akan duduk sama-sama untuk membereskan masalah ini.

Kepada Pak Nyoman, kita menurut kita sedang bereskan permasalahan-permasalahan, terutama Permendag-Permendag dibereskan masalah pertama, pertanggungjawaban daripada dana-dana yang diblokir. *Insyah* Allah Pak, 307 miliar ini akan keluar dan kita akan bereskan. Kita akan, saya baru denger juga nih pasar tipe C dan D ini mesti 2.000 meter. Karena, seingat saya tahun 2014 dulu, saya sudah membetulkan satu pasar di di Bali, mustinya tidak ada masalah.

Tetapi, kita akan cari jalan ketemunya dan untuk pagu indikatif yang turun, Pak Nyoman. Sebenarnya, Kementerian Perdagangan masuk Top 10 yang terbaik pada tahun 2020 penyerapannya dan kami ingin menyelesaikan itu juga dengan baik, tetapi juga dengan pertanggungjawaban yang baik.

Pak Ketua, kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa menjawab dan pagu indi, apa namanya RKA K/L ini bisa dibantu dan di kuatkan oleh Komisi VI agar target daripada Kementerian Perdagangan ini bisa tercapai dengan baik.

Terima kasih, Bapak Pimpinan.

Belum, Pak. Saya belum pelajari itu. Nanti kita lihat, Pak. Saya belum maaf, saya belum sampai ke Undang-Undang Nomor 3 masalah gula itu Pak ya, iya.

KETUA RAPAT:

Baik, kita langsung ke kesimpulan.

ANGGOTA KOMISI VI:

Pimpinan, izin sedikit. Sedikit aja setengah menit.

Pak Mendag, terkait program prioritas Pak Mendag ini, produsen pasar rakyat dan SRG ini. Karena sebelumnya punya Bapak ini diblokir. Bapak ajukan di 2022. Saya minta Bapak supaya berkoordinasi lebih erat lagi dengan Kementerian Keuangan, Pak. Karena, saya habis, kami habis rapat dengan Ibu Menteri itu, kurang gimana gitu Pak. Jadi, karena nanti Bapak rapat agar di, dirayu lagilah Pak.

MENTERI PERDAGANGAN:

Iya, saya saya kemarin sudah bicara sama Menteri Bappenas PPN, ikut rapat sama beliau. Memang, habis ini kita akan ke Menteri Keuangan. Ini memang permohonan saya, memang belum sampai sampai ke sana.

Terima kasih.

F-PDIP (Dr. EVITA NURSANTY, M.Sc.):

Izin, satu menit Pak Ketua. Pimpinan, izin. Satu menit aja.

KETUA RAPAT:

Nggak, setengah menit.

F-PDIP (Dr. EVITA NURSANTY, M.Sc.):

Iya, terima kasih. Gelap gelap nggak kelihatan nih, saya ini aja *profile*.

**Bapak Menteri,
Bapak Wakil Menteri, dan
Jajaran yang saya hormati,**

Saya hanya ingin bertanya. Sudah hampir lebih dari satu tahun lebih ya, satu setengah tahun saya duduk di Komisi VI. Saya tidak melihat adanya sinergisitas antara Anggota Komisi VI dan Perdagangan di dalam program-program yang berkaitan dengan kemasyarakatan. Bayangkan selain dari pasar, tidak ada sinergisitas program-program lain yang disinergikan kepada kami anggota, Pak Menteri.

Apakah memang tidak ada program perdagangan ini kepada kepada masyarakat, kepada rakyat. Ini yang menjadi pertanyaan saya, Pak. Sementara, di departemen lain itu ada sosialisasi, ada yang lain-lain gitu. Nah, perdagangan ini sebenarnya kalau saya lihat dari anggaran yang diajukan, itu banyak sekali programnya. Tetapi, kenapa program-program ini tidak bisa disinergikan dengan kami Anggota Komisi VI yang memang bertanggungjawab sebagai sumpah jabatan kami untuk membawa program-program tersebut ke dapil, Pak Menteri.

Tolong, Pak Menteri *assign* satu orang untuk LO-nyalah ke kita, yang mengurus ini Pak Menteri. Jangan sampai ada yang dapat, ada yang nggak. Kita ini sama-sama semuanya Anggota DPR Komisi VI.

Saya rasa demikian, Bapak Pimpinan. Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik, nanti kita dalamin pas dengan Eselon I, Bu.

F-PDIP (Ir. DEDDY YEVRI HANTERU SITORUS, M.A.):

Saya 30 detik aja, Pimpinan.

F-PDIP (Dr. EVITA NURSANTY, M.Sc.):

Kemarin, sudah dialami.

F-PDIP (Ir. DEDDY YEVRI HANTERU SITORUS, M.A.):

Pak Menteri, mohon maaf tadi saya agak terlambat, ada tamu.

Saya mau mengundang Pak Menteri saja, karena upaya saya dan teman-teman untuk supaya daerah Kalimantan Utara mendapatkan izin untuk *transshipment* itu sudah lengkap semua, baik dari Kementerian Perdagangan, Bea Cukai, dari balai karantina dan sebagainya dan teman-teman mungkin akan mengadakan acara. Nanti untuk *launching*-nya di Kalimantan Utara.

Saya berharap Bapak bisa hadir, ya Bapak atau Pak Wakil Menteri dan Pak Dirjen. Karena, bagi saya ini satu kesempatan emas buat kita, Pak. Karena, mumpung pelabuhan Tawau dan Sandakan yang puluhan tahun menikmati kue ekonomi dari aktifitas masyarakat kita, sekarang kita bisa apa namanya langsung dan terus terang, pasar Filipina Selatan itu, Pak sekarang di dalam genggamannya kita. Jadi, ini sangat baik untuk kita.

Saya terima kasih buat jajaran Kementerian Perdagangan terutama Pak Didi dan semua yang lain saya kira.

Saya kira itu, Pak. Terima kasih.

MENTERI PERDAGANGAN:

Terima kasih.
Saya *insya* Allah datang.

KETUA RAPAT:

Terima kasih.
Oke, kita ke draft kesimpulan.

Draft kesimpulan Rapat Kerja Komisi VI DPRRI dengan Menteri Peradgangan RI. Pembahasan RKP K/L dan RKA K/L tahun 2022. Senin, 31 Mei 2021.

1. Komisi VI DPRRI menerima penjelasan Kementerian Perdagangan RI terkait realisasi penyerapan anggaran sampai dengan 28 Mei 2021 sebesar Rp 618.698.776.225 (*enam ratus delapan belas miliar enam ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus dua puluh lima rupiah*) atau 21,06% dari total pagu Rp 2.937.385.806.000 (*dua triliun sembilan ratus tiga*

puluh tujuh miliar tiga ratus delapan puluh lima juta delapan ratus enam ribu rupiah).

Bisa setuju ya?

(RAPAT: SETUJU)

2. Komisi VI DPRRI meminta Kementerian Perdagangan RI untuk terus melakukan koordinasi dengan Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan RI terkait dengan pemblokiran anggaran sebesar Rp 307,49 miliar untuk pembiayaan kegiatan Kementerian Perdagangan RI TA 2021 antara lain:
 - a. Pembangunan/Revitalisasi Pasar Rakyat sebesar Rp 164,45 miliar;
 - b. Pembangunan Pusat Produk Dalam Negeri Unggulan Daerah di Makasar sebesar Rp 30 miliar;
 - c. Pembangunan Pusat Jajanan Kuliner di 10 Kawasan Wisata sebesar Rp 44 miliar;
 - d. Pembangunan/Revitalisasi Gudang Non-SRG sebesar Rp 16,5 miliar;
 - e. Kegiatan lainnya (pengadaan kendaraan operasional, pengadaan peralatan perkantoran, pembangunan lanjutan gedung standarisasi dan pengendalian mutu, dll) sebesar Rp 52,54 miliar.

Setuju ya.

(RAPAT: SETUJU)

3. Komisi VI DPRRI menerima penjelasan alokasi Anggaran Kementerian Perdagangan RI Tahun Anggaran 2022 berdasarkan Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor S-361/MK.02/2021 dan nomor B.238/M.PPN/D.8/PP.04.02/04/2021 perihal Pagu Indikatif Belanja K/L Tahun Anggaran T.A 2022, sebesar Rp 2.392.277.527.000 (*dua triliun tiga ratus sembilan puluh dua miliar dua ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus dua puluh tujuh ribu rupiah*).

Setuju ya.

F-PG (NUSRON WAHID):

Pak Ketua, Pak Ketua, Pak Ketua.

Saya justru nggak menerima ini. Saya maunya dikembalikan pagunya minimal sama dengan tahun lalu. Jadi, pada satu sisi sudah disampaikan pagunya turun dari 2,9 jadi 2,3. Nah, masa kita terima anggarannya diturunin, ya kan.

Saya mengusulkan justru kalau bisa, ya kan Komisi VI tidak bisa menerima, ya kan penurunan pada satu sisi penjelasannya kita terima, ok. Tapi pada sisi lain bahwa sikap pemerintah dalam hal ini Menteri Keuangan dan Bappenas yang menurunkan pagu Kementerian Perdagangan dari 2,9 jadi 2,3, Komisi VI tidak bisa terima gitu.

KETUA RAPAT:

Ya oke, ini kan kita menerima penjelasan dulu. Itu kalau mau di dimasukin di tambahan nanti.

F-P. GERINDRA (ANDRE ROSIADE):

Ditambah di kesimpulan selanjutnya aja.

KETUA RAPAT:

Dan itu juga harusnya menterinya yang mengajukan. Kalau kita bisa menyampaikan sikaplah nanti ya. Kita pasang poin berikutnya. Ntar dulu, kita selesaikan dulu ini yang normatifnya ya.

(RAPAT:SETUJU)

4. Komisi VI DPRRI menerima penjelasan dan mendukung pengajuan usulan tambahan anggaran Kementerian Perdagangan RI TA 2022 sebesar Rp 288.738.240.000 (*dua ratus delapan puluh delapan miliar tujuh ratus tiga puluh delapan juta dua ratus empat puluh ribu rupiah*) untuk membiayai beberapa program/kegiatan antara lain:
 - a. Pemenuhan belanja operasional KDEI sebesar Rp 8.070.780.000 (*delapan miliar tujuh puluh juta tuju ratus delapan puluh ribu rupiah*);
 - b. Kegiatan pengembangan ekonomi digital Indonesia tahun 2022 sebesar Rp 10.000.000.000 (*sepuluh miliar rupiah*);
 - c. Pengawasan kegiatan Kemendag, pengawalan perbaikan tata kelola di lingkungan Kemendag dan pengawasan urusan pemerintah daerah bidang perdagangan sebesar Rp 19.424.230.000 (*Sembilan belas miliar empat ratus dua puluh empat juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah*);
 - d. Pelaksanaan presidensi G20, persiapan ketuanrumahan ASEAN 2023, ketuanrumahan dalam ICCO dan ITRC, pelaksanaan FTA center di pusat dan daerah dan beberapa perundingan lain yang belum teranggarkan sebesar Rp 69.369.860.000 (*enam puluh Sembilan miliar tiga ratus enam puluh Sembilan juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah*);
 - e. Kelengkapan sarana dan prasarana perkantoran dan perkuliahan, di antaranya: pengadaan meubelair gedung kelas B dan C, pengadaan alat laboratorium dan pembangunan lanjutan gedung kampus Akademi Metrologi

- (AKMET) sebesar Rp 90.572.370.000 (*Sembilan puluh miliar lima ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah*);
- f. Penyelenggaraan jalur *inpassing* dan peralatan laboratorium pengujian mutu barang sebesar Rp 1.500.000.000 (*satu miliar lima ratus juta rupiah*);
 - g. Pengembangan ruang lingkup pelayanan kalibrasi, pengembangan ruang lingkup layanan pengujian mutu barang, instalasi pengujian UTTP dan pengelolaan SUML, edukasi konsumen, pelaksanaan pengawasan *post border* dan pengawasan kegiatan perdagangan sebesar Rp 32.901.000.000 (*tiga puluh dua miliar Sembilan ratus satu juta rupiah*);
 - h. Penyelenggaraan Sail Tidore yang semula dilaksanakan Tahun 2021 menjadi Tahun 2022 sebesar Rp 20.000.000.000 (*dua puluh miliar rupiah*);
 - i. Pengadaan dan pemasangan *chiller* gedung I dan gedung II, lift gedung jalan jambu, pengelolaan sarana dan prasarana gedung Kemendag sebesar Rp 36.900.000.000 (*tiga puluh enam miliar sembilan ratus juta rupiah*).

Setuju ya. Baik

(RAPAT: SETUJU)

Komisi VI DPRRI memberikan waktu kepada Kementerian Perdagangan RI untuk menyampaikan jawaban secara tertulis paling lama 10 (*sepuluh*) hari kerja atas pertanyaan Anggota Komisi VI DPRRI.

Ya, oke.

(RAPAT: SETUJU)

Gimana, mau dikasih catatan? Catatanlah ya.

F-PG (NUSRON WAHID):

Catatan itu nggak ada kekuatan. Kesimpulan.

KETUA RAPAT:

Coba coba didaftarkan, tulis.

F-PG (NUSRON WAHID):

Bukan, bahwa sikap politik kita nggak terima. Gitu aja.

ANGGOTA:

Tolong itu skenario.

ANGGOTA:

Kan masih pembahasan awal juga, Pimpinan yang di sana.

ANGGOTA:

Tolong ditulis itu sekretariat.

ANGGOTA:

Komisi.

KETUA RAPAT:

Ntar dulu, Pak Menterinya mau nggak naikin.

MENTERI PERDAGANGAN:

Saya gini, Pak Ketua.

Pak Gus Nusron yang saya hormati.

Kita ini memang sebenarnya sudah dipanggil oleh Bapak Presiden. Karena, memang ini urusannya adalah sesuai dengan *budget* negara juga. Jadi, kalau saya disuruh ini, saya minta maaf. Tapi, kalau hak politik DPR, saya ikut mendukung gitu.

Terima kasih, Gus.

F-P. GERINDRA (ANDRE ROSIADE):

Udah dipanggil Presiden. Catatan aja sudah.

KETUA RAPAT:

Ini mau ditulis catatan. Ini saya meragukan komitmen pemerintah dalam. Udahlah mending.

F-PG (NUSRON WAHID):

Keuangan, kesimpulan politik. Tapi, kalau sudah Presiden catatan saja kalau gitu.

KETUA RAPAT:

Tidak tertulis berarti ya.

Baik, kalau gitu kita mengucapkan terima kasih, Pak Menteri ada mau *closing statement*.

MENTERI PERDAGANGAN:

Terima kasih, Pak Ketua.

Bapak Ibu Anggota Komisi VI yang saya hormati.

Saya berterima kasih atas kerja samanya. Mudah-mudahan, terutama beberapa catatan yang diberikan oleh Anggota Dewan yang terhormat, saya akan perhatikan dan kita akan kembali ke *drawing word*, terutama dari Bu Evita tadi bahwa kita ingin mempunyai satu sinergitas antara Komisi VI dan Kementerian Perdagangan secara baik.

Saya akan kerjakan seperti yang diundangkan kepada Kalimantan Utara sebagai bagian dari sinergitas tersebut. Jadi, kita akan bersama-sama untuk bekerja dan musti ada hasilnya yang bisa dilihat oleh rakyat bersama dan saya setuju bahwa ini adalah bagian. Kita akan menunjuk LO-nya sebagaimana dengan kegiatan-kegiatan Komisi VI yang selalu didampingi oleh Kementerian Perdagangan.

Saya berterima kasih, Bapak Pimpinan. Mudah-mudahan kerja sama kita bisa berlangsung dengan baik di masa yang akan datang.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik, terima kasih kepada Bapak Menteri Perdagangan Republik Indonesia beserta seluruh jajarannya dan Pak Wamen juga tentunya.

Saya atas nama Pimpinan Komisi VI, sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada seluruh Anggota Komisi VI yang telah dengan penuh sabar dan perhatian mengikuti raker kita pada hari ini dan rapat saya tutup dengan bacaan *hamdalah*, "*Alhamdulillahirabbilalamin*".

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

(RAPAT DITUTUP PUKUL 18.48 WIB)

JAKARTA, 31 MEI 2021

a.n KETUA RAPAT
SEKRETARIS RAPAT,

Ttd.

DEWI RESMINI, S.E., M.Si.
NIP.197104071992032001